

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, adapun uraian kesimpulan dari penelitian ini yakni :

1. Hasil analisis LQ (*Location Quotient*) terhadap PDRB Kota Kupang tahun 2012-2016 dapat di rinci sebagai berikut :
  - a. Pada tahun 2012, sebelas sektor pembentuk PDRB Kota Kupang semuanya tergolong sektor non basis atau hasil analisis menunjukkan angka lebih kecil dari 1;
  - b. Pada tahun 2013-2016, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta sektor Pertambangan dan Penggalian tergolong sektor non basis, sedangkan sektor-sektor lain yakni sektor Industri pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruks, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan Jasa perusahaan, Jasa-jasa tergolong sektor basis.
2. Berdasarkan hasil analisis Klassen Typology diketahui bahwa:
  - a. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta sektor Pertambangan dan Penggalian di Kota Kupang pada tahun 2012-2016 tergolong dalam kelompok sektor relatif terbelakang;

- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian di Kota Kupang tahun 2012-2016 selalu tergolong sektor relatif terbelakang;
- c. Sektor Industri Pengolahan di Kota Kupang pada tahun 2012-2016 tergolong dalam sektor Maju Tapi Tertekan;
- d. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas di Kota Kupang pada tahun 2012 termasuk dalam kelompok sektor berkembang, sedangkan pada tahun 2013 tergolong dalam sektor maju dan di tahun 2014 dan 2015 sektor ini tergolong dalam sektor maju tapi tertekan selanjutnya pada tahun 2016 sektor ini termasuk dalam kelompok sektor relatif terbelakang;
- e. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang di Kota Kupang pada tahun 2012 dan 2015 sektor ini termasuk dalam kelompok sektor maju sedangkan pada tahun 2013, 2014 dan 2016 sektor ini termasuk dalam kelompok sektor maju tapi tertekan;
- f. Sektor Konstruksi di kota Kupang pada tahun 2012-2016 sektor ini termasuk dalam kelompok sektor maju tapi tertekan;
- g. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kota Kupang pada tahun 2012-2016 sektor ini termasuk dalam sektor maju tapi tertekan;
- h. Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kota Kupang pada tahun 2012-2016 sektor ini termasuk dalam sektor maju tapi tertekan;

- i. Sektor Informasi dan Komunikasi di Kota Kupang pada tahun 2015 termasuk dalam kelompok sektor maju, sedangkan pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2016 sektor ini termasuk dalam kelompok sektor maju tapi tertekan;
- j. Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa perusahaan di Kota Kupang pada tahun 2012-2016 sektor ini termasuk dalam sektor maju tapi tertekan;
- k. Sektor Jasa-jasa di Kota Kupang pada tahun 2012-2016 sektor ini termasuk dalam sektor maju tapi tertekan.

## **6.2 Saran**

Melalui skripsi ini adapun beberapa hal yang dapat penulis uraikan sebagai saran di antaranya sebagai berikut :

1. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita Kota Kupang kebijakan yang hendak diambil harus di arahkan untuk lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor basis/ unggulan serta sektor maju yang secara proporsional tumbuh lebih cepat dan berpotensi untuk di kembangkan.
2. Pengembangan sektor basis/ unggulan serta sektor maju harus memberikan *multiflier effect* pada pengembangan sektor-sektor non basis yang juga memiliki potensi untuk dikembangkan.
3. Perlu adanya inovasi terbaharukan baik dalam pemanfaatan maupun pemeliharaan sektor-sektor pembentuk PDRB, artinya sektor yang tergolong basis/unggul atau sektor maju tidak harus dieksploitasi sebesar-besarnya sehingga mengakibatkan pengurangan dari segi kuantitas yang berimbas pada kualitas, selain itu sektor-

sektor yang belum tergolong sektor basis/unggulan atau sektor maju perlu mendapatkan perhatian lebih karena pada dasarnya sektor-sektor tersebut juga mempunyai potensi untuk dikembangkan namun belum dikembangkan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln.1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.BPFE.Yogyakarta.
- Biro Pusat Statistik, 2016, Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten /Kota 2012-2016. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.Kupang
- Boediono.1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE.Yogyakarta.
- Dr. Nur Indriantoro, Akuntan dan Drs. Bambang Supomo, Akuntan, 2009, Metodologi Penelitian, BPFE. Yogyakarta.
- Glasson, Jhon, 1997, Pengantar Perencanaan Regional, terjemahan Paul Sitohang, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2002, Analisis Spasial dan Regional, UPP AMP YKPN,Yogyakarta.
- Nugroho Iwan dan Dahuri Rokhmin, 2004, Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Perseveranda, M.E, 2011, Sektor Unggulan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.1,No, 2.
- Putra Fajar Utama. 2010. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Di Kabupaten/ Kota Yang Tergabung Dalam Kawasan Kedungsepur Tahun 2004, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Richardson, Harry W, 1991, Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional, terjemahan Paul Sitohang, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-UI, Jakarta.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat,2011, Metodologi Penelitian, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Sitohang, Paul, 1991, Dasar-dasar Ilmu Ekonmi Regional, Lembaga Penerbit Fakultas Ekomi-UI, Jakarta.
- Sjafrizal, 1997, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Prisma No. 3 Tahun XXVI, Maret 1997.
- Soepono, Prasetyo, 2001, Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor) : Posisi dan Sumbangan Bagi Pembendaharaan Alat-alat Analisis Regional, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 16,No. 1.
- Sukirno, Sadono,2004, Makroekonomi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2004. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi, Bumi Aksara,Jakarta.

Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.